

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400) ;

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 tentang APBD Kabupaten Brebes TA. 2022;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang perubahan atas Perbup no.87 tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA. 2022;
 29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang perubahan kedua atas Perbup nomor 87 tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA. 2022;
 30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2022;
 31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 48 Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2022;
 32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 53 Tahun 2022 tanggal 1Juli 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021;
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 75 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2022
 34. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. *Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan*

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			-	#DIV/0!
2	PENDAPATAN TRANSFER			-	#DIV/0!
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			-	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah			-	
2	Retribusi Daerah			-	
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah			-	
	Jumlah PAD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil Pajak				
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
3	Dana Alokasi Umum				
4	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1	Dana Otonomi Khusus				
2	Dana Penyesuaian				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah Pendapatan Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1	Pendapatan Hibah				
2	Pendapatan Dana Darurat				
3	Pendapatan Lain-lain				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	37.899.211.390,00	36.627.895.888,00	(1.271.315.502,00)	96,65%
2	Belanja Barang dan Jasa	24.563.302.082,00	22.316.038.266,00	(2.247.263.816,00)	90,85%
3	Belanja Modal	280.330.000,00	233.653.450,00	(46.676.550,00)	83,35%
	Jumlah	62.742.843.472,00	59.177.587.604,00	(3.565.255.868,00)	94,32%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 36.627.895.888 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 37.899.211.390 atau 96,65%.
- Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 22.316.038.266 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 24.563.302.082 atau 90,85%.
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 233.653.450 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 280.330.000 atau 83,35 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 94,32% dari yang dianggarkan.

3. Tabel pencapaian target dan realisasi pembiayaan (khusus SKPKD)

a. Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Penyertaan Modal Daerah				
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
4	Pemberian Pinjaman Daerah				
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten.
2. Standar Satuan Harga (SSH) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar sehingga penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tidak maksimal.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar NIHIL atau realisasi mencapai NIHIL .

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pajak Hotel				
Pajak Restoran				

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pajak Hiburan				
Pajak Reklame				
Pajak Penerangan Jalan				
Pajak Parkir				
Pajak Air Tanah				
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
Pajak Bumi dan Bangunan				
Pajak Lingkungan				
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dapat terealisasi NIHIL sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Retribusi Pelayanan Kependudukan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal				
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila				
Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
Retribusi Penyeberangan di Air				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
Retribusi Izin Usaha Perikanan				
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas				
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian bagian laba sebagai berikut :

Nama BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta	Realisasi 2022
PT. Bank Jateng	
PD Bank Brebes	
BKK Banjarharjo	
BKK Jateng	
PD Air Minum Tirta Husada (PDAM)	
PD Percetakan	
PD Farmasi	
PRPP	
Jumlah	NIHIL

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar NIHIL.

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan				
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Kerja Sama Daerah				
Jasa Giro Kas Daerah				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Bunga				
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Pendapatan Denda Pajak Daerah				
Pendapatan Denda Retribusi Daerah				

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
Pendapatan dari Pengembalian				
Pendapatan BLUD				
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf				
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA				
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL.

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Dana Perimbangan				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar NIHIL.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Dana Darurat

Dana Darurat berupa NIHIL.

Dana Darurat :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Dana Darurat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Pendapatan Hibah Dana BOS				
Pendapatan atas Pengembalian Hibah				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 59.177.587.604 dari anggaran Rp. 62.742.843.472 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Operasi	62.462.513.472,00	58.943.934.154,00	0,94	58.946.328.182,00
b. Belanja Modal	280.330.000,00	233.653.450,00	0,83	554.859.775,00
Jumlah	62.742.843.472,00	59.177.587.604,00	1,78	59.501.187.957,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 58.943.934.154 dari anggaran sebesar Rp. 62.462.513.472 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	37.899.211.390,00	36.627.895.888,00	0,97	36.972.926.517,00
Belanja Barang dan Jasa	24.563.302.082,00	22.316.038.266,00	0,91	21.973.401.665,00
Jumlah	62.462.513.472,00	58.943.934.154,00	0,94	58.946.328.182,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.599.621.000,00	2.486.215.880,00	0,96	2.815.625.282,00
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.845.417.390,00	1.621.444.354,00	0,88	1.470.391.812,00
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.420.000,00	54.420.000,00	1,00	-
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.003.753.000,00	32.072.815.654,00	0,97	32.293.909.423,00
e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	396.000.000,00	393.000.000,00	0,99	393.000.000,00
Jumlah	37.899.211.390,00	36.627.895.888,00	0,97	36.972.926.517,00

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang	3.181.997.382,00	2.475.265.608,00	0,78	3.058.403.565,00
b. Belanja Jasa	6.760.881.000,00	5.981.425.366,00	0,88	7.207.638.805,00
c. Belanja Pemeliharaan	960.299.900,00	705.905.817,00	0,74	725.718.399,00
d. Belana Perjalanan Dinas	13.660.123.800,00	13.153.441.475,00	0,96	10.981.640.896,00
J u m l a h	24.563.302.082,00	22.316.038.266,00	0,91	21.973.401.665,00

1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Barang Pakai Habis	3.181.997.382,00	2.475.265.608,00	0,78	3.058.403.565,00
J u m l a h	3.181.997.382,00	2.475.265.608,00	0,78	3.058.403.565,00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

2) Belanja Jasa sebesar Rp. 5.981.425.366,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Jasa Kantor	3.850.976.000,00	3.269.163.948,00	0,85	3.074.030.245,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.500.000,00	10.517.918,00	0,84	3.658.560,00
c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	144.355.000,00	135.825.000,00	0,94	183.550.000,00
d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	116.500.000,00	115.000.000,00	0,99	150.850.000,00
e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	46.550.000,00	38.549.500,00	0,83	8.550.000,00
f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	700.000.000,00	697.369.000,00	1,00	
g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.890.000.000,00	1.715.000.000,00	0,91	3.787.000.000,00
J u m l a h	6.760.881.000,00	5.981.425.366,00	0,88	7.207.638.805,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 705.905.817 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	629.533.900,00	376.349.817,00	0,60	415.759.399,00
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299.290.000,00	299.200.000,00	1,00	289.737.000,00
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.476.000,00	30.356.000,00	0,96	20.222.000,00
J u m l a h	960.299.900,00	705.905.817,00	0,74	725.718.399,00

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 13.153.441.475 dengan rincian sebagai berikut :

Belana Perjalanan Dinas :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.660.123.800,00	13.153.441.475,00	0,96	10.981.640.896,00
J u m l a h	13.660.123.800,00	13.153.441.475,00	0,96	10.981.640.896,00

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 233.653.450 dari anggaran sebesar Rp. 280.330.000 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.330.000,00	184.197.450,00	0,80	531.159.775,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00	23.700.000,00
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000,00	49.456.000,00	0,97	-
Jumlah	280.330.000,00	233.653.450,00	0,83	554.859.775,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 184.197.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.685.000,00	109.191.750,00	0,73	391.594.275,00
b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.326.000,00	2.000.000,00	0,60	9.180.000,00
c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.500.000,00	950.000,00	0,27	
d. Belanja Modal Komputer	73.819.000,00	72.055.700,00	0,98	130.385.500,00
e. Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	0,00	
f. Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.000.000,00	-	0,00	
Jumlah	230.330.000,00	184.197.450,00	0,80	531.159.775,00

b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 49.456.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio %	Realisasi 2021
a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.456.000,00	0,99	-
Jumlah	50.000.000,00	49.456.000,00	0,99	-

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021.

Pendapatan-LO tahun 2022 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO				
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO				
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – Lo adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Pajak Daerah – LO				
a. Pajak Hotel-LO				
b. Pajak Restoran-LO				
c. Pajak Hiburan-LO				
d. Pajak Reklame-LO				
e. Pajak Penerangan Jalan-LO				
f. Pajak Parkir-LO				
g. Pajak Air Tanah-LO				
h. Pajak Sarang Burung Walet-LO				
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO				
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO				
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO				
l. Pajak Lingkungan - LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a. Retribusi Jasa Umum-LO				
b. Retribusi Jasa Usaha-LO				
c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO				
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO				
b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
d. Hasil Kerja Sama Daerah-LO				
e. Jasa Giro-LO				
f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO				
g. Pendapatan Bunga-LO				
h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO				
i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO				
j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO				
k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				
l. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO				
m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO				
n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO				
o. Pendapatan dari Pengembalian-LO				
p. Pendapatan dari BLUD-LO				
q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO				
s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO				
t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO				
u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO				
v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO				
w. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO				
x. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO				
y. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2022 adalah sebesar NIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
d. Bantuan Keuangan - LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2022 adalah sebesar NIHIL sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO				
b. Dana Darurat – LO				
c. Pendapatan Lainnya – LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang				
d. Dst.....				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2022 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
i. Dst....				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban				
a. Beban Operasi	60.187.024.377,00	60.562.016.711,00	374.992.334,00	1%
b. Beban Transfer			-	0%
Jumlah	60.187.024.377,00	60.562.016.711,00	374.992.334,00	0,01

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	36.632.978.286,00	37.008.823.904,00	375.845.618,00	1%
b. Beban Persediaan	2.474.663.308,00	22.054.001.601,00	19.579.338.293,00	89%
c. Beban Jasa	5.977.675.396,00		(5.977.675.396,00)	0%
d. Beban Pemeliharaan	705.905.817,00		(705.905.817,00)	0%
e. Beban Perjalanan Dinas	13.153.441.475,00		(13.153.441.475,00)	0%
f. Beban Bunga			-	0%
g. Beban Subsidi			-	0%
h. Beban Hibah			-	0%
i. Beban Bantuan Sosial			-	0%
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.242.360.095,00	1.499.191.206,00	256.831.111,00	17,1%
k. Beban Penyisihan Piutang			-	0%
l. Beban Lain-lain			-	0%
Jumlah	60.187.024.377,00	60.562.016.711,00	374.992.334,00	1,07

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.222.518.295 dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	749.197.758
b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.653.912
c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.666.625

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 berupa amortisasi software sebesar Rp. 19.841.800 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2022 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2022	Nilai Software	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)	Beban Amortisasi 2022 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)
Software anti virus internet security	7	322.500	64.500	322.500	-	322.500
Software: Microsoft windows	7	2.677.625	535.525	2.677.625	-	2.677.625
Aplikasi Perjalanan dinas	4	49.753.000	9.950.600	29.851.800	9.950.600	39.802.400
JDIH	1	49.456.000	9.891.200	-	9.891.200	9.891.200
Jumlah	19	102.209.125	20.441.825	32.851.925	19.841.800	52.693.725

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar NIHIL terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	NIHIL

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
a. Beban Bagi Hasil				
b. Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Beban Bagi Hasil

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Bagi Hasil				
a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Bantuan Keuangan				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa				
f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Beban Tak Terduga tahun 2022 sebesar NIHIL adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :
- Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp
 - Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp
 - Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp
- Penggunaan secara rinci telah disampaikan pada penjelasan Belanja Tak Terduga.

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				0%
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				0%
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				0%
JUMLAH	-	-	-	0
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				0%
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				0%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	5.000.000,00	37.664.285,71		0%
JUMLAH	5.000.000,00	37.664.285,71	-	0
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	(5.000.000,00)	(37.664.285,71)	-	0

1. Surplus Non Operasional
Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
	Jumlah	NIHIL

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
	Jumlah	NIHIL
	Total	NIHIL

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	5.000.000,00
	Jumlah	5.000.000,00
	Total	5.000.000,00

Penjelasan :

- a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
Pada tahun 2022 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar NIHIL. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku NIHIL (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar NIHIL karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar NIHIL.
- b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL.
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp. 5.000.000

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 21.919.953.014** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 22.381.143.875, ditambah Surplus-LO TA 2022 sebesar minus **Rp. 60.192.024377** ditambah Dampak Kumulatif

Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp. 553.245.912** , dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 59.177.587.604**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	553.245.912,00	
Jumlah	553.245.912,00	-

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 614.995.912 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp. 974.495.912,00 – Rp. 359.500.000) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022 (Rp)
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	46.800.000,00
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	862.045.889,00
Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	3.900.031,00
Jumlah	912.745.920,00

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2022 (Rp)
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	359.500.000,00
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	8,00
Jumlah	359.500.008,00

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
ASET		
Aset Lancar	10.373.000,00	9.770.700,00
Aset Tetap	22.837.706.780,00	22.421.929.870,00
Aset Lainnya	137.015.400,00	112.401.200,00
Jumlah Aset	22.985.095.180,00	22.544.101.770,00
KEWAJIBAN & EKUITAS		
Kewajiban	164.290.323,00	162.957.895,00
Ekuitas	22.820.804.857,00	22.381.143.875,00
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	22.985.095.180,00	22.544.101.770,00

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan

daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	10.373.000,00	9.770.700,00
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	10.373.000,00	9.770.700,00

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2022	Th. 2021
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar NIHIL dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2022	Th. 2021
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar NIHIL.

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Bahan	-	-
Suku Cadang	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	10.373.000,00	9.770.700,00
Obat-obatan	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
Natura dan Pakan	-	-
Persediaan Penelitian	-	-

Persediaan Dalam Proses	-	-
Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	10.373.000,00	9.770.700,00

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Bahan		221.962.743,00	221.962.743,00	-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	9.770.700,00	1.032.101.465,00	1.031.499.165,00	10.373.000,00
Obat-obatan		10.384.200,00	10.384.200,00	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		1.210.817.200,00	1.210.817.200,00	-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	9.770.700,00	2.475.265.608,00	2.474.663.308,00	10.373.000,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2022 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Penambahan :	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	9.770.700
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	2.475.265.608,00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	2.475.265.608,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	2.474.663.308,00
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	2.474.663.308,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	10.373.000,00

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar NIHIL merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2022 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 21.936.854.937 dan Rp. 22.421.929.870 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2022	Th. 2021
a. Tanah	49.017.790,00	1.084.500,00
b. Peralatan dan Mesin	15.267.508.151,00	15.556.505.701,00
c. Gedung dan Bangunan	25.607.053.778,00	24.913.654.608,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	145.028.000,00	145.028.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	329.838.025,00	329.838.025,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		36.558.000,00
g. Akumulasi Penyusutan	(19.461.590.807,00)	(18.560.738.964,00)
Jumlah Aset Tetap	21.936.854.937,00	22.421.929.870,00

Mutasi aset tetap tahun 2022 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2022
a. Tanah	1.084.500,00	47.933.290,00	-	49.017.790,00
b. Peralatan dan Mesin	15.556.505.701,00	234.197.450,00	523.195.000,00	15.267.508.151,00
c. Gedung dan Bangunan	24.913.654.608,00	1.350.240.340,00	656.841.170,00	25.607.053.778,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	145.028.000,00	-	-	145.028.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	329.838.025,00	-	-	329.838.025,00

URAIAN JENIS	SALDO 2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2022
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	36.558.000,00	-	36.558.000,00	-
JUMLAH	40.982.668.834,00	1.632.371.080,00	1.216.594.170,00	41.398.445.744,00

- 1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	184.197.450,00
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	707.974.460,00
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	36.558.000,00
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	46.800.000,00
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	656.841.170,00
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	1.632.371.080,00

Penjelasan :

- a) Mutasi masuk senilai Rp. 707.974.460,00 berupa:
- Kendaraan Tosa (Sepeda Motor) dari Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes senilai Rp. 50.000.000
 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes senilai Rp. 1.133.290
 - Bangunan Gedung Kantor Permanen dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes senilai Rp. 656.841.170
- b) Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih) berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp. 46.800.000.
- c) Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap) senilai Rp. 656.841.170 berupa:
- Reklas dari kode aset tetap Bangunan Gedung Kantor Permanen ke kode aset Bangunan Fasilitas Umum senilai Rp. 276.845.970
 - Reklas dari kode aset tetap Bangunan Gedung Kantor Permanen ke kode aset Bangunan Gedung Tempat Ibadah

senilai Rp. 379.995.200 m

- 2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	359.500.000,00
10	Reklas Dari Kdp Ke Aset Tetap	36.558.000,00
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	163.695.000,00
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	656.841.170,00
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	1.216.594.170,00

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar NIHIL dan Rp. 36.558.000 . Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022	Ket
belanja modal bangunan gedung kantor - detail engineering pengadaan mushola, kantin dan tempat parkir pada sekretariat DPRD Kabupaten Brebes TA 2021	12.858.000,00		12.858.000,00	-	Telah Selesai

Uraian Pekerjaan	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022	Ket
belanja modal bangunan gedung kantor - detail engineering pengadaan mushola, kantin dan tempat parkir pada sekretariat DPRD Kabupaten Brebes TA 2021	23.700.000,00		23.700.000,00	-	Telah Selesai
JUMLAH	36.558.000,00	-	36.558.000,00	-	-

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.949.391.905,00)	(749.197.764,00)	(317.766.457,00)	(14.380.823.212,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.455.667.684,00)	(471.653.914,00)	(3,00)	(4.927.321.595,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(90.029.375,00)	(1.666.625,00)	-	(91.696.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(65.650.000,00)	-	(3.900.000,00)	(61.750.000,00)
Jumlah	(18.560.738.964,00)	(1.222.518.303,00)	(321.666.460,00)	(19.461.590.807,00)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(749.197.758,00)			(6,00)	(749.197.764,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(471.653.912,00)			(2,00)	(471.653.914,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.666.625,00)				(1.666.625,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					-
Jumlah	(1.222.518.295,00)	-	-	(8,00)	(1.222.518.303,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(317.766.429,00)		(28,00)	(317.766.457,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			(3,00)	(3,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			(3.900.000,00)	(3.900.000,00)
Jumlah	(317.766.429,00)	-	(3.900.031,00)	(321.666.460,00)

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 137.015.400 dan Rp. 112.401.200 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2022	Saldo Th. 2021
Tagihan Jangka Panjang	87.500.000,00	92.500.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	
Aset Tidak Berwujud	102.209.125,00	52.753.125,00
Aset Lain-lain	-	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(52.693.725,00)	(32.851.925,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	137.015.400,00	112.401.200,00

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2022 sebesar Rp. 87.500.000

2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 102.209.125. Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

a. Pengadaan software/aplikasi tahun 2022 sebesar Rp. 49.456.000

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar

(Rp. 32.851.925)

b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2022 sebesar (Rp. 19.841.800)

4. Aset Lain-lain Rp. 139.700.000,00 terdiri atas:

a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp. 139.700.000

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Aset Tetap Rusak Berat/TD	167.380.000,00	-	27.680.000,00	139.700.000,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				-
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(167.380.000,00)		(27.680.000,00)	(139.700.000,00)
Jumlah	(0,00)	-	-	(0,00)

1) Pengurangan barang RB/TD tahun 2022 sebesar Rp. 27.680.000

a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp. 27.680.000. Atas barang-barang tersebut yang telah dihapus-bukukan dan tidak tercatat pada KIB.

b. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Aset RB)	(167.380.000,00)		(27.680.000,00)	(139.700.000,00)
				-
Jumlah	(167.380.000,00)	-	(27.680.000,00)	(139.700.000,00)

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengurangan karena penghapusan sebesar (Rp. 27.680.000)

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 162.957.895 dan Rp. 164.290.323 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	162.957.895,00	164.290.323,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	162.957.895,00	164.290.323,00

1. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 164.290.323 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Pegawai	114.147.387,00	119.229.785,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa	48.810.508,00	45.060.538,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	162.957.895,00	164.290.323,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
- 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp. 119.229.785
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :
- | | | |
|---|----|------------|
| a. Beban Tagihan Telepon | Rp | 209.142 |
| b. Beban Tagihan Air | Rp | 2.034.500 |
| c. Beban Tagihan Listrik | Rp | 17.999.806 |
| d. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp | 20.917.090 |
| e. Beban Jasa Tenaga Administrasi | Rp | 3.900.000 |

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
- 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar Rp. 114.147.387
- b. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|------------|
| a. Beban Tagihan Telepon | Rp | 222.545 |
| b. Beban Tagihan Air | Rp | 1.534.500 |
| c. Beban Tagihan Listrik | Rp | 19.401.163 |
| d. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp | 5.452.300 |
| e. Beban Jasa Tenaga Administrasi | Rp | 3.700.000 |
| f. Beban Jasa Tenaga Ahli | Rp | 18.500.000 |

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetero kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 21.765.881.585 dan Rp. 22.381.143.875. Perubahan atas ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	22.381.143.875,00
Surplus/(Defisit)-LO	(60.192.024.377,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Ekuitas Lainnya	399.174.483,00

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	59.177.587.604,00
EKUITAS AKHIR	21.765.881.585,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp . Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar (Rp.59.177.587.604,00) sehingga memiliki perbedaan sebesar (Rp. 1.014.436.773,00). Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(59.177.587.604,00)
Penambahan	2.220.089.710,00
Pengurangan	3.234.526.483,00
Surplus/(Defisit) LO	(60.192.024.377,00)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.7.1**

3.5.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.5.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	36.632.978.286,00	36.627.895.888,00	(5.082.398,00)
Beban Barang dan Jasa	22.311.685.996,00	22.316.038.266,00	4.352.270,00
Beban Bunga			-
Beban Subsidi			-
Beban Hibah			-
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyisihan Piutang			-
Beban Lain-lain			-
Jumlah	58.944.664.282,00	58.943.934.154,00	(730.128,00)

1. **Beban Pegawai**

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.486.215.880,00	2.486.215.880,00	-

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.626.526.752,00	1.621.444.354,00	(5.082.398,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2021	119.229.785,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	114.147.387,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	5.082.398,00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.420.000,00	54.420.000,00	-

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	32.072.815.654,00	32.072.815.654,00	-

e. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.000.000,00	393.000.000,00	-

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	2.474.663.308,00	2.475.265.608,00	602.300,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
saldo akhir Persediaan Tahun 2022	10.373.000,00
penggunaan/pemakaian saldo Persediaan awal	9.770.700,00
Selisih	602.300,00

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	5.977.675.396,00	5.981.425.366,00	3.749.970,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	45.060.538,00
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	48.810.508,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	(3.749.970,00)

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	705.905.817,00	705.905.817,00	-

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	13.153.441.475,00	13.153.441.475,00	-

3.5.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	749.197.758,00		(749.197.758,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	471.653.912,00		(471.653.912,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.666.625,00		(1.666.625,00)
Jumlah	1.222.518.295,00	-	(1.222.518.295,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Beban Penyusutan th. 2021	1.222.518.295,00
Selisih	1.222.518.295,00

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.841.800,00		(19.841.800,00)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2022	19.841.800,00
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	19.841.800,00

3.5.1.2.3. Beban Transfer

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.5.1.2.4. Beban Tidak Terduga

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.5.1.2.5. Defisit Non Operasional

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO			-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO			-
Defisit Dari kegiatan Operasional Lainnya - LO	5.000.000,00		(5.000.000,00)
Jumlah	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			-
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			-
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			-
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			-
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			-
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			-
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			-
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	-		-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			-
Jumlah	-	-	-

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes tertuang dalam Restra 2020-2024, sebagai berikut :

Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yaitu ;

a. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah :

**“ TERWUJUDNYA DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG UNGGUL
TERHADAP KINERJA FUNGSI DPRD ”**

b. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan sumber daya manusia organisasi
2. Meningkatkan fasilitas organisasi/ lembaga dengan dukungan substansi kinerja DPRD melalui anggaran yang konsisten
3. Meningkatkan disiplin organisasi
4. Meningkatkan kesejahteraan SDM organisasi
5. Meningkatkan peranan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan efisiensi kerja, manajemen dan pelayanan

Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD. Disamping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif di daerah yang berada didaerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

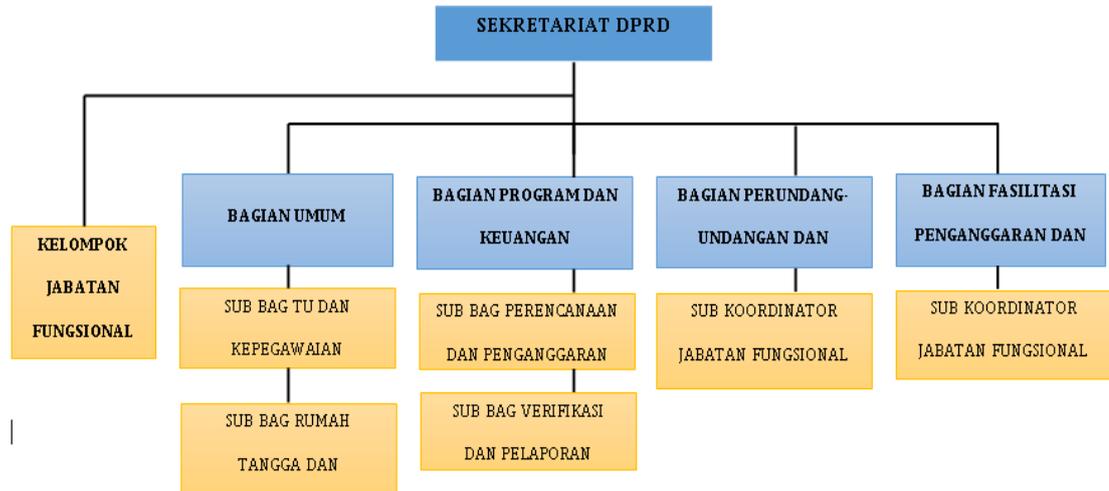
Uraian Tugas :

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkungan Kabupaten/DPRD/Lembaga/Masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membina dan mengarahkan kebijakan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien;

4. Menyelenggarakan fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan;
5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
6. Untuk menciptakan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
7. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang ditetapkan;
8. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran tugas.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Sekretaris;
2. Bagian Program & Keuangan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3. Bagian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Persidangan;
 - a. Sub Koordinator Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Koordinator Fasilitasi Persidangan dan Risalah .
4. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Sarana dan Prasarana :

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kab. Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Gedung sidang paripurna DPRD 2 lantai
2. Gedung Komisi dan Fraksi 2 Lantai
3. Kantor Sekretariat DPRD
4. Mushola
5. Kendaraan dinas Operasional roda 4 dan 2
6. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, AC, Sound system dll
7. Jaringan internet dan ruangan zoom meeting
8. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka penanganan covid 19, seperti :
 - Adanya alat pengukur suhu tubuh
 - Adanya wastafel dan sabun cuci tangan
 - Adanya hand sanitizer
 - Adanya proses sterilisasi menggunakan desinfectan secara periodik.

Sumber Daya Manusia :

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah 34 ASN dan 2 Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	1	-	-	-	1
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	-
Pendidikan SLTA	2	-	8	1	-	9
Sarjana Muda / D III	-	-	-	-	-	-
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	17	2	19
Program S 2	-	-	-	2	3	5
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	2	1	8	20	7	36

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Eselon

Eselon	Jumlah
Eselon 2	1
Eselon 3	4
Eselon 4	4
Jabatan Fungsional	4
Jumlah	13

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Brebes memiliki Tenaga Harian Lepas sejumlah 57 orang.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

KOMAR, S.E.
NIP. 19640714 199203 1 006

5.